



# JRAK

**Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)**

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol. 11, No. 2, Juli 2025

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

## ANALISIS VARIANCE ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS PADA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Emilia Gustini<sup>1</sup>, Viara Meiza<sup>2</sup>**

Universitas Bina Darma

Email: [emilia.gustini@binadarma.ac.id](mailto:emilia.gustini@binadarma.ac.id)<sup>1</sup>, [viarameiza0505@gmail.com](mailto:viarameiza0505@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Official travel expenses represent a key component of the operational budget in government institutions, requiring efficient and accountable management. This study aims to analyze, identify contributing factors, and evaluate the effectiveness of budget management and the realization of official travel expenditures at the South Sumatra Provincial Archives Office. A descriptive quantitative method was employed, using variance analysis techniques to compare the allocated budget with actual spending. The data used were secondary data sourced from the 2022 budget report. The analysis results indicate that the management of official travel budgets in 2022 was effective and efficient, with a realization rate of 96.53% of the total allocated budget and a positive variance of 3.47%. This reflects budget efficiency without compromising the quality of activity implementation.*

**Keywords:** *archives; effective; efficient; variance.*

### Pendahuluan

Dinas Kearsipan merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip secara sistematis agar dapat dengan mudah diakses saat dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016, Dinas ini memiliki fungsi strategis dalam penyusunan kebijakan, pembinaan, serta penyelenggaraan urusan kearsipan daerah (Lubis, 2021).

Dalam konteks keuangan, setiap instansi pemerintah daerah memiliki pengeluaran yang tercantum dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk belanja operasional seperti belanja perjalanan dinas (Suryana, 2024). Belanja perjalanan dinas penting dalam mendukung tugas kedinasan, tetapi kerap ditemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya. Ketidaksesuaian ini disebut sebagai *variance*, yang dapat berupa selisih positif (realisasi lebih rendah) atau negatif (realisasi melebihi anggaran), menunjukkan potensi inefisiensi (Arifiyani, 2022).

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023 dan laporan dari Kemendagri (2021), belanja perjalanan dinas di berbagai daerah cenderung tidak efisien. Temuan ICW (2024) juga mengungkapkan bahwa pos ini rentan terhadap penyimpangan dan pemborosan. Di Dinas Kearsipan Sumsel, tercatat bahwa realisasi belanja barang dan jasa hanya mencapai 57,09% dan 59,92% dari anggaran, menimbulkan pertanyaan apakah hal ini mencerminkan efisiensi atau justru kelemahan pelaksanaan anggaran.

Permendagri No. 15 Tahun 2024 mengatur bahwa belanja perjalanan dinas mencakup transportasi, penginapan, uang harian, dan uang representasi. *Variance* yang besar dapat menunjukkan kelemahan dalam perencanaan atau pelaksanaan anggaran. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan harus mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Septiana & Zulkifli, 2024).

Analisis *variance* menjadi metode penting dalam menilai efektivitas anggaran. *Variance* yang tinggi bisa disebabkan oleh perencanaan tidak berbasis data historis, implementasi yang tidak efektif, atau hambatan teknis. Meskipun demikian, tidak semua *variance* menunjukkan kelemahan (Ratnasari & Munawaroh, 2019).

Penelitian ini menggunakan Teori Akuntabilitas Publik sebagai landasan, yang menekankan kewajiban lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada atasan dan Masyarakat (Amiruddin et al., 2021). Ketika terdapat selisih antara anggaran dan realisasi, perlu dianalisis apakah hal tersebut terjadi karena efisiensi atau kelemahan pelaksanaan. *Variance* dapat dijadikan indikator penting dalam

mengukur tingkat akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran perjalanan dinas (Kewas et al., 2024).

## Metode Penelitian

### Kuantitatif Deskriptif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan data numerik yang diperoleh dari dokumen atau catatan yang ada (Yuniarti, 2022). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis sejauh mana perbedaan (*variance*) antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja perjalanan dinas pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan (Hakim et al., 2023).

Metode yang digunakan adalah analisis *variance*, merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam menghitung selisih antara nilai anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas. Analisis ini tentunya bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi kelebihan atau kekurangan anggaran serta sejauh mana selisih tersebut berdampak terhadap efisiensi dan akuntabilitas keuangan instansi (Zulfikar et al., 2021).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran Tahun 2022. Data ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen keuangan yang relevan (Zulfikar et al., 2021).

## Hasil dan Pembahasan

Penyusunan perencanaan anggaran di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan diawali

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang membahas isu strategis, capaian target, serta kebutuhan kegiatan kearsipan berdasarkan masukan dari masyarakat dan pegawai. Selanjutnya, disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mencakup rencana kegiatan, biaya, sumber dana, dan jadwal pelaksanaan. RKA ini dibahas bersama DPRD untuk mendapat persetujuan dan kemudian disahkan menjadi bagian dari APBD. Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan kegiatan dimulai, diikuti dengan proses pengadaan barang/jasa, *monitoring* dan evaluasi, hingga penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran melibatkan berbagai pihak dan tahapan penting, dari Musrenbang hingga pelaporan realisasi.

Proses penetapan anggaran perjalanan dinas di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara sistematis setiap tahun. Dimulai dari identifikasi kebutuhan perjalanan dinas oleh masing-masing bidang, seperti monitoring arsip, koordinasi ke ANRI, pelatihan, dan forum kearsipan. Kegiatan ini dirinci dalam RKA-SKPD dengan estimasi biaya yang mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Daerah (SBD). Usulan tersebut kemudian dievaluasi oleh TAPD dan dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan dalam APBD. Setelah itu, disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas, dan pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan lengkap dengan dokumen pendukung. Proses ini mencerminkan komitmen terhadap

pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan rutin melaksanakan perjalanan dinas untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan arsip. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kebijakan kearsipan, memperluas jaringan kerja, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Bentuk kegiatan meliputi koordinasi kelembagaan dengan ANRI, monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip di OPD kabupaten/kota, pelatihan dan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan kepada perangkat daerah dan masyarakat, serta kunjungan kerja dan studi komparatif ke daerah lain. Semua kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Selatan melalui pos belanja operasional, khususnya belanja barang dan jasa untuk perjalanan dinas, dengan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku.

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022**

| No | Uraian                             | Jumlah (Rp)      | Keterangan                            |
|----|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1  | Anggaran Belanja Perjalanan Dinas  | 1.016.140.000,00 | Sesuai RKA 2022                       |
| 2  | Realisasi Belanja Perjalanan Dinas | 980.899.523,00   | Hingga 31 Desember 2022               |
| 3  | Selisih (Variance)                 | 35.240.477,00    | Selisih antara anggaran dan realisasi |
| 4  | Persentase Realisasi               | 96,53%           | Tingkat serapan anggaran              |

Berdasarkan Tabel 1 dokumen resmi Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta laporan realisasi keuangan tahun 2022, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp1.016.140.000,00 untuk belanja perjalanan dinas. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi belanja mencapai Rp980.899.523,00, sehingga

menghasilkan selisih atau *variance* sebesar Rp35.240.477,00. Persentase realisasi terhadap anggaran tercatat sebesar 96,53%, yang menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi serta mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Tingkat realisasi anggaran yang hampir mencapai 100% mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 telah berjalan sesuai rencana, dengan efisiensi yang tinggi dan tanpa pemborosan yang signifikan. Hasil observasi lapangan serta wawancara dengan pihak pengelola keuangan memperkuat temuan ini, dengan penjelasan bahwa selisih anggaran bukan disebabkan oleh pembatalan kegiatan, melainkan hasil dari strategi efisiensi yang diterapkan secara sadar dan terukur. Efisiensi ini dicapai melalui optimalisasi jumlah peserta dan durasi perjalanan, pemilihan moda transportasi yang lebih hemat, efisiensi penggunaan dana harian dan akomodasi, serta penyesuaian jadwal yang menggabungkan beberapa kegiatan dalam satu kali perjalanan dinas. Kegiatan monitoring dan evaluasi ke daerah-daerah dilakukan secara terkoordinasi guna mengurangi frekuensi perjalanan, sementara pemilihan penginapan dan transportasi tetap mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) pemerintah, namun dengan mempertimbangkan efisiensi. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi internal dijadwalkan dengan memperhatikan efektivitas biaya operasional, sehingga pengeluaran dapat ditekan tanpa mengurangi capaian output kegiatan. Dengan pengelolaan yang efisien ini, selisih anggaran sebesar Rp35.240.477,00 atau 3,47% dikategorikan sebagai *favorable variance*, yang dalam teori penganggaran menunjukkan

penggunaan anggaran yang hemat dan bertanggung jawab. Tidak ditemukan indikasi adanya *unfavorable variance* atau pemborosan, yang menegaskan bahwa Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas tahun 2022, serta menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya keuangan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran sesuai tujuan kedinasan.

Secara umum, anggaran belanja barang dan jasa yang dialokasikan kepada Plt Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 4.316.800.760,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp 3.949.919.504,00. Jika dikalkulasikan, maka persentase realisasi barang dan jasa sebesar 91,48% dari total anggaran. Data tersebut dijelaskan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Belanja Barang dan Jasa**

| Komponen                | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   | Persentase Realisasi (%) |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Belanja Barang dan Jasa | 4.316.800.760,00 | 3.949.919.504,00 | 91,48%                   |

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Tingkat realisasi sebesar 91,48% menunjukkan bahwa mayoritas anggaran dapat direalisasikan dengan baik, walaupun terdapat selisih sebesar Rp 366.881.256,00 atau sekitar 8,52%. Selisih ini tidak serta-merta menunjukkan kegagalan realisasi, namun bisa mencerminkan upaya efisiensi, penyesuaian kegiatan, atau penghematan anggaran karena perubahan kondisi lapangan, seperti *refocusing* belanja, pembatalan kegiatan, atau realisasi harga satuan yang lebih rendah dari estimasi awal.

Belanja perjalanan dinas merupakan salah satu bagian dari belanja operasional yang masuk pada pos belanja barang dan jasa yang

dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional kedinasan, baik yang bersifat administratif, koordinatif, maupun peningkatan kapasitas pegawai melalui rapat kerja, pelatihan, serta kunjungan luar daerah. Pada tahun anggaran 2022, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas sebesar Rp 1.016.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 980.899.523,00. Persentase realisasi mencapai 96,53%, yang berarti terdapat variance atau selisih sebesar Rp 35.240.477,00 antara anggaran dan realisasi, seperti yang disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022**

| Uraian                   | Perjalanan Dinas |
|--------------------------|------------------|
| Anggaran (Rp)            | 1.016.140.000,00 |
| Realisasi (Rp)           | 980.899.523,00   |
| Persentase Realisasi (%) | 96,53%           |
| Variance (Rp)            | 35.240.477,00    |
| Persentase Variance (%)  | 3,47%            |

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Anggaran perjalanan dinas pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp 1.016.140.000,00 yang mencakup beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas dalam negeri, rapat koordinasi, forum diskusi, konsultasi kerja, pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis (bimtek), serta kegiatan monitoring dan evaluasi program kerja dinas. Realisasi anggaran mencapai Rp 980.899.523,00, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Terdapat selisih anggaran (*variance*) sebesar Rp 35.240.477,00 atau 3,47%, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk efisiensi anggaran. *Variance* ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain efisiensi penggunaan sumber daya seperti transportasi dan

akomodasi yang lebih ekonomis dari estimasi awal, optimalisasi kegiatan dalam satu kali perjalanan dinas dengan menggabungkan beberapa agenda sekaligus, adanya penjadwalan ulang atau pembatalan kegiatan akibat perubahan kebijakan internal maupun dari pemerintah pusat, serta penyesuaian biaya perjalanan berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) daerah. Dengan demikian, pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada tahun tersebut dapat dikatakan efisien dan mencerminkan komitmen Dinas Kearsipan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan tingkat realisasi sebesar 96,53%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja perjalanan dinas pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan secara efektif dan akuntabel. Capaian ini mencerminkan adanya kesesuaian yang baik antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menunjukkan kemampuan instansi dalam mengelola sumber daya secara rasional, serta mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas publik, di mana anggaran digunakan secara bijak dan tepat sasaran. Penyajian data ini juga memberikan pondasi awal yang kuat untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab selisih anggaran (*variance*) dan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan anggaran perjalanan dinas sebagai bagian integral dari sistem tata kelola keuangan daerah yang transparan. Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, diketahui bahwa anggaran belanja perjalanan dinas yang dialokasikan sebesar Rp 1.016.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 980.899.523,00. Selisih atau *variance* antara anggaran dan realisasi tercatat sebesar Rp 35.240.477,00, yang

jika dipersentasekan terhadap total anggaran menunjukkan efisiensi sebesar 3,47%. Dengan demikian, tingkat realisasi anggaran mencapai 96,53%, yang mengindikasikan bahwa dana yang dialokasikan telah digunakan hampir sepenuhnya untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas, namun tetap menyisakan ruang efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

*Variance* yang terjadi perlu dianalisis untuk mengetahui apakah hal tersebut mencerminkan efisiensi, inefisiensi, atau adanya kendala dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang dapat ditarik sebagai interpretasi dari data yang ada. Pertama, tingkat efisiensi yang tinggi tercermin dari realisasi belanja perjalanan dinas yang hampir mendekati 100%, yang menunjukkan bahwa alokasi dana telah digunakan secara optimal sesuai dengan perencanaan program kerja tanpa terjadi pemborosan atau penggunaan dana di luar kebutuhan aktual. Kedua, kontrol anggaran yang baik terlihat dari selisih yang hanya sebesar Rp 35.240.477,00 dari total anggaran Rp 1.016.140.000,00. Hal ini mengindikasikan adanya pengawasan internal yang efektif serta manajemen anggaran yang disiplin, menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dan didukung oleh proses *monitoring* serta evaluasi yang berjalan dengan baik. Ketiga, adanya penyesuaian di lapangan menjadi faktor tambahan penyebab *variance*, seperti pembatalan perjalanan untuk efisiensi, perubahan jadwal kegiatan, atau penggabungan beberapa agenda dalam satu waktu. Penyesuaian semacam ini menunjukkan kemampuan adaptasi dinamis dari instansi terhadap perubahan situasi dan kebutuhan aktual di lapangan.

Dalam teori anggaran, *variance* dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, ***Favorable Variance (Selisih Positif)***, yaitu kondisi ketika realisasi anggaran lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. *Variance* jenis ini menunjukkan adanya efisiensi dan dianggap sebagai indikator positif dalam praktik pengelolaan keuangan karena mencerminkan penggunaan dana yang hemat tanpa mengurangi capaian kinerja. Kedua, ***Unfavorable Variance (Selisih Negatif)***, yaitu ketika realisasi anggaran melebihi jumlah yang telah direncanakan, yang dapat mengindikasikan potensi pemborosan, praktik *overbudgeting*, atau lemahnya pengawasan keuangan.

Namun, dalam penelitian ini tidak ditemukan indikasi pemborosan atau *overbudgeting*. Berdasarkan data, *variance* sebesar Rp 35.240.477,00 dari total anggaran Rp 1.016.140.000,00 tergolong sebagai *favorable variance*, karena terjadi penghematan dana tanpa mengorbankan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain, kegiatan tetap berjalan sesuai target, namun dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Kondisi ini memperkuat penerapan prinsip transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi bukti adanya pengelolaan anggaran yang baik oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih atau *variance* sebesar Rp 35.240.477,00 antara anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp 1.016.140.000,00 dan realisasi sebesar Rp 980.899.523,00. Nilai *variance* ini setara dengan 3,47% dari total anggaran, yang menunjukkan

perbedaan relatif kecil serta berada dalam batas efisiensi yang wajar menurut standar pengelolaan keuangan daerah.

Selisih tersebut tidak mencerminkan ketidaktepatan dalam penyusunan anggaran, melainkan menggambarkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. Penghematan yang terjadi disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti efisiensi biaya perjalanan melalui pemilihan moda transportasi yang lebih ekonomis, pemanfaatan fasilitas pemerintah, serta pengurangan biaya akomodasi. Selain itu, terdapat penyesuaian jadwal, penggabungan kegiatan, bahkan pembatalan kegiatan yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi fiskal pasca pandemi.

Lebih jauh, perbedaan ini juga merefleksikan pendekatan kehati-hatian dalam penyusunan anggaran. Dalam banyak kasus, praktik *overestimate* digunakan sebagai langkah antisipatif terhadap fluktuasi harga atau kebutuhan mendesak. Namun demikian, realisasi anggaran tetap berlandaskan pada prinsip kebutuhan riil dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, yang menunjukkan kesadaran para pengelola anggaran terhadap pentingnya akuntabilitas publik dan transparansi dalam penggunaan dana negara.

Dengan tingkat realisasi sebesar 96,53%, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja perjalanan dinas tergolong sangat efektif. Sebagian besar program dan kegiatan yang memerlukan mobilitas pegawai berhasil dilaksanakan sesuai rencana. *Variance* yang tercipta tidak mengindikasikan pemborosan atau penyimpangan, melainkan menjadi indikator positif bahwa anggaran telah digunakan secara efisien tanpa mengurangi kualitas kinerja dinas.

Oleh karena itu, pengelolaan anggaran perjalanan dinas oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dapat dinilai optimal. Tingginya nilai realisasi dan kecilnya selisih anggaran menjadi cerminan bahwa unit kerja ini mampu menyeimbangkan antara target program dan pengendalian keuangan. Hal ini menjadi parameter penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan organisasi sektor publik, terutama dalam konteks belanja operasional yang fleksibel seperti perjalanan dinas.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja perjalanan dinas pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dikelola secara efisien, dengan penghematan anggaran sebesar 3,47% yang masih berada dalam batas toleransi dan tidak mengganggu capaian program. *Variance* tersebut dikategorikan sebagai *favorable variance*, yang mencerminkan praktik *good governance*, pengendalian anggaran yang baik, serta akuntabilitas publik yang kuat. Dengan pengelolaan seperti ini, Dinas Kearsipan memainkan peran strategis dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan pemerintah.

### Kesimpulan

Pengelolaan anggaran perjalanan dinas Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, dengan realisasi sebesar 96,53% dan efisiensi anggaran (*favorable variance*) sebesar 3,47%. Efisiensi ini disebabkan oleh optimalisasi sumber daya, penggabungan kegiatan, serta penyesuaian berdasarkan kebijakan dan standar biaya. Ke depan, disarankan agar efisiensi ini dipertahankan melalui penguatan pengendalian internal, perencanaan berbasis data historis,

peningkatan kompetensi SDM, serta penyempurnaan sistem pelaporan demi mendukung akuntabilitas dan tata kelola anggaran yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., Kusumah, A., & Sari, A. D. P. (2021). Analisis Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. *Tinta Nusantara*, 2(1), 46–59. <https://doi.org/10.55770/tn.v2i1.14>
- Arifiyani, N. (2022). *Pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (pad) pada pemerintah kabupaten bogor dan pemerintah kota bogor periode 2011-2020*.
- Hakim, N., Abdullah, J., & Hasan, W. (2023). Analisis Kinerja Anggaran Belanja dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 89–96.
- Kewas, L. F., Tawas, Y., & Sumual, F. M. (2024). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 17(1978), 228–236. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4727>
- Lubis, N. S. (2021). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara*. 6.
- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i1.142>
- Septiana, A., & Zulkifli. (2024). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Suryana, A. Y. (2024). *Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Dana Pembangunan Desa Menggala Sakti Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah*. 15(1), 37–48.
- Yuniarti, S. (2022). Literature Review : Realisasi Anggaran Dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (Rkas) Di Smpit Al-Izzah Kota Serang. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 181–194. <https://doi.org/10.32478/leadership.v3i2.1007>
- Zulfikar, A. J., R. Siahaan, M. Y., & Syahputra, R. B. (2021). *Analisis Signifikansi Roda Skateboard Berbahan Komposit Serbuk Batang Pisang Terhadap Perfoma Kecepatan Dengan Metode Anova*. 4(2), 83–90. <https://doi.org/10.30596/rmme.v4i2.8068>

---

#### Copyright holder:

Emilia Gustini, Viara Meiza (2025)

#### First publication right:

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

#### This article is licensed under:

